

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DISEKOLAH  
DASAR SDN SEPANG**

**Aini Khairunnisa<sup>1</sup>, Lusi Hoeriyah<sup>2</sup>, Ratu Ismahayati Lutfiah<sup>3</sup>, Sastra Wijaya<sup>4</sup>, Ika  
Evitasari Aris<sup>5</sup>**

[221449@upg.ac.id](mailto:221449@upg.ac.id)<sup>1</sup>, [221461@upg.ac.id](mailto:221461@upg.ac.id)<sup>2</sup>, [221480@upg.co.id](mailto:221480@upg.co.id)<sup>3</sup>, [sastrawijaya0306@gmail.com](mailto:sastrawijaya0306@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[ika.aris@gmail.com](mailto:ika.aris@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Primagraha**

**ABSTRAK**

Sekolah Dasar dengan program pendidikan inklusi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan. Pendidikan inklusi di sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat siswa sekolah dasar yang masih perlu perhatian intensif dari pendidik ditambah dengan kehadiran siswa berkebutuhan khusus, tentunya hal tersebut bukan mudah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menganalisis adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, sehingga didapatkan temuan bahwa guru perlu mengetahui lebih banyak mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 13 pandeglang maka kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat perlu bekerjasama dalam implementasi untuk dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar.

**Kata Kunci:** Perbedaan, Kekuatan, Pengembangan Potensinya.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi yang harus dimiliki oleh semua manusia demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Hal tersebut disadari oleh pendiri Negara dalam pembentukan awal pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merumuskan sebuah Undang-Undang Dasar tahun 1945 masalah pendidikan yang dicantumkan pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam dunia pendidikan ada berbagai sistem pendidikan, salah satunya adalah lembaga pendidikan sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah program pemerintah dalam bidang pendidikan yang baru keberadaannya di Indonesia, yang merupakan sebuah langkah pendekatan yang berusaha mentransfer sistem pendidikan yang meniadakan hambatan yang dapat menghalangi semua siswa baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus untuk berperan aktif dalam pendidikan. Jadi, pendidikan Inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama anak lainnya (normal) demi mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pada tahun 2009 pemerintah lewat menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang sekolah Inklusi dengan peraturan Menteri RI Nomor 70 tahun 2009 pasal 2, tentang tujuan dari pendidikan Inklusi di Indonesia adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau yang memiliki bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pasal 3 ayat 1, bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pasal 3 ayat 2, bahwa peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang/ zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda. Dengan mengacu UU Sisdiknas tahun 2005, pasal 5 ayat 1 yang menegaskan setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua instrumen hukum di atas menegaskan bahwa seluruh anak warga Negara Indonesia, tidak terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan perlakuan yang sama pula oleh pemerintah dengan fasilitas yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada. Demikian diharapkan agar tercipta anak-anak Indonesia penerus bangsa yang berkualitas dan bermartabat.

Penyelenggaraan pendidikan sekolah Inklusi di Indonesia pada saat ini masih terkendala oleh beberapa masalah, diantaranya adalah belum seimbang jumlah pendidik dengan jumlah peserta didik, serta keefektifan belajar yang masih kurang. Berbagai penelitian yang terjadi di sekolah Inklusi banyak yang berkaitan dengan tenaga pengajar (Praptiningrum 2010; Prastadila & Paramita 2013; Puspitasari & Handayani 2014). Lebih spesifik lagi Hidayah (2010), mengatakan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah inklusi dengan jumlah pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus masih belum seimbang, akibatnya proses belajar mengajar tidak berjalan dengan optimal. Di satu sisi seorang guru harus berjuang keras untuk memenuhi tuntutan hati nurani untuk membekali pengetahuan bagi seluruh muridnya, dan di sisi lain guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus, jadi ini menjadi beban tersendiri bagi guru yang di dalam kelasnya terdapat anak yang berkebutuhan khusus (Praptiningrum, 2010). Seorang guru pada sekolah inklusi harus memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus. Adapun karakteristik kemampuan belajar anak

berkebutuhan khusus menurut Gable & Hendrickson (Mahabbati, 2013), yaitu pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kurang, mudah lupa dengan pengetahuan atau keterampilan yang baru diperoleh, kesulitan dalam menyiapkan diri untuk belajar, kesulitan dalam memperhatikan pelajaran, memiliki masalah dalam motivasi belajar atau mengerjakan tugas, kesulitan dalam berbahasa ekspresif atau bahasa reseptif, lemah dalam keterampilan sosial dan pemecahan masalah, rendahnya kemampuan membantu diri dan kemampuan beradaptasi dan merasakan dampak-dampak lain dalam kehidupan sehari-hari akibat kebutuhan khususnya. Berdasarkan gambaran karakteristik anak berkebutuhan khusus tersebut di atas, maka jika guru tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus akan menjadi beban tersendiri, karena guru mengalami kesulitan dalam memahami dan mengajar siswa dengan berbagai karakteristik yang berbeda.

Menurut Ninda (2014), guru yang berada di sekolah Inklusi jauh berbeda dengan guru sekolah umum, baik dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang mencakup perannya sebagai pengajar serta kebutuhan siswa-siswinya, hal ini dikarenakan guru sekolah Inklusi tidak hanya mengajar anak-anak normal melainkan mengajar ABK pula. Uraian di atas menunjukkan bahwa beban yang dihadapi oleh guru pada sekolah Inklusi sangat jauh berbeda dengan guru pada sekolah umum, hal ini dikarenakan beban yang diterima sangat jauh berbeda karena tuntutan untuk menjadi guru sekolah inklusi dibutuhkan kompetensi dan pendidikan khusus, sehingga mengakibatkan sebagian guru yang mengajar di sekolah Inklusi sering mengalami stres ketika menghadapi keanekaragaman karakter anak didiknya. Jadi, tingkat stres yang dialami oleh guru pada sekolah inklusi lebih besar dari pada guru yang mengajar di sekolah umum. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Hidayah (2011), yang menyatakan bahwa tingkat stres yang dialami guru sekolah Inklusi memiliki intensitas lebih tinggi dibandingkan dengan guru sekolah umum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah warga sekolah seperti kepala sekolah dan guru di SDN Sepang. Data dikumpulkan melalui metode observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil keterangan wawancara bahwa sekolah inklusi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar seperti yang sudah berjalan di SD Negeri Sepang Kota Serang. Selain itu kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi putra-putrinya juga mulai tumbuh atau berkembang. Penyelenggaraan sekolah inklusi di SD Negeri Sepang tidak lepas dari perhatian pemerintah. Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya di sekolah. Program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik di kelas dalam lingkungan dan layanan pendidikan yang sama, kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat menuntut mereka dapat berbaur serta berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam Untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik maka perlu menyiapkan mereka sejak belajar di sekolah menjadi suatu keharusan. Peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama, meskipun dengan hambatan dan perbedaan kemampuan yang mereka miliki Siswa yang tidak terbiasa bergaul dalam keragaman majemuk di sekolah akan menjadi sulit bergaul dengan lingkungan masyarakat. Kebersamaan siswa di sekolah inklusi ditujukan pula untuk mereduksi kesenjangan agar

mereka terbiasa hidup dalam keragaman, sehingga mereka saling mengenal, mengetahui, dan memahami tentang keberadaan setiap individu. Anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran dalam hubungannya dengan peserta didik normal, demikian sebaliknya, bahwa peserta didik normal dapat belajar bagaimana mengembangkan sikap untuk bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus interaksi antar siswa sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi pengenalan mereka di sekolah akan berlanjut pada interaksi mereka di luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturahmi antar siswa, dan terkadang melibatkan orang tua serta keluarga, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menjadi jalan bagi peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus bahwa sekolah inklusi dapat menjadi model terapi dalam mengurangi kesenjangan kehidupan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Model pendampingan yang dilakukan di sekolah inklusi pada jam belajar atau jam khusus konseling peserta didik dapat menjadi kesempatan upaya pengobatan atau terapis bagi siswa.

Pendidikan inklusi merupakan solusi bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengalami tekanan psikologis karena keadaan yang menimpa dirinya. Mengangkat harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus, merasa diterima dan tidak terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya akan dapat mendorong aktivitas siswa lebih aktif serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Lembaga pendidikan yang dapat merangkul dan menerima keragaman seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrastruktur, maupun sistem pembelajaran yang kompatibel dengan kebutuhan individu peserta didik yang beragam Konsep education for all (pendidikan untuk semua) mengisyaratkan perlunya sekolah serta lembaga pendidikan mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi dan pemahaman serta mampu mendidik dan mengajar setiap individu sebagai akibat bahwa human differences dan learning styles differences dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan normal, Implementasi kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar perlu ditinjau secara menyeluruh agar diketahui apakah pendidikan inklusi yang telah diterapkan sudah berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan pengguna serta dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan yang dirancang dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasi penerapannya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri Implementasi pada Program Pendidikan dapat dikaji berdasarkan dua variabel menurut Merilee S. Grindle, dua variabel tersebut adalah variabel Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Hasil dan pembahasan penelitian ditemukannya masalah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi, akan tetapi permasalahan tersebut tidak menghambat jalannya proses implementasi program pendidikan inklusi di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan inklusi telah berjalan dengan baik sesuai dengan target sasaran yang hendak dicapai atas kerjasama kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Inklusi Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat diketahui faktor pendukung dari implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri Sepang adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru,

dinas pendidikan dan masyarakat untuk mendukung berjalannya program pendidikan inklusi.

Kerjasama tersebut tercermin dalam kebijakan sekolah yang mendorong pelaksanaan program pendidikan inklusi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung tersebut menjadi keuntungan bagi sekolah dan lingkungan masyarakat serta siswa dalam berinteraksi, bersosialisasi dan toleran terhadap perbedaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Inklusi Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi tentunya ada faktor penghambat yang menjadi sebuah tantangan bagi kepala sekolah dan guru, masih ada paradigma pandangan masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sulit untuk ditangani, sehingga menimbulkan adanya komplain dari beberapa orang tua murid yang keberatan anaknya disatu kelaskan dengan anak berkebutuhan khusus. Faktor penghambat lainnya masih kurangnya pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan guru bukan dari pendidikan luar biasa. Pada umumnya guru di sekolah dasar berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus secara spesifik. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi adalah kurikulum yang belum berreorientasi disusun untuk program sekolah inklusi, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik. Disamping itu sarana pendukung di sekolah belum cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.

Upaya Kepala Sekolah dan Guru dalam Implementasi Pendidikan Inklusi Lembaga sekolah dan dinas pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan dan mencari solusi untuk menangani hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pendidikan inklusi. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya: 1) Sosialisasi yang dilakukan bersama komite sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran pada seluruh orang tua murid di sekolah dasar tersebut; 2) Pelatihan dan workshop mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus terus dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu layanan pada implementasi program pendidikan inklusi dan sebagai peningkatan kompetensi guru; 3) Pihak sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan pelatihan pengembangan model kurikulum dalam upaya reorientasi kurikulum bagi sekolah inklusi; 4) Sekolah terus berupaya melengkapi sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada sekolah inklusi, dengan bekerjasama dinas pendidikan pemerolehan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemenuhan fasilitas pada sekolah inklusi.

## **KESIMPULAN**

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membentuk generasi penerus bangsa agar dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta menghindari sifat diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraannya terdapat faktor pendukung serta penghambat implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri 13 pandeglang masih ditemukan beberapa kendala, akan tetapi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat terus berupaya melakukan kerjasama untuk melakukan peningkatan implementasi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar. Penelitian ini berdampak bagi sekolah dasar negeri 13 kabupaten pandeglang untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan, sehingga upaya yang dilakukan sekolah dapat dievaluasi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif.
- Dewi, N. (2017). Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud. In *journal.uny.ac.id*.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/15657>
- Ilahi, M. T. (2016). Pendidikan Inklusif. *Ar-Ruzz Media*.
- Junanto, S., & Kusna, N. A. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). *INKLUSI*, 5(2), 179.  
<https://doi.org/10.14421/ijds.050202>
- Kadir, A. (2015). PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA Abd. Kadir (Dosen PAI FTK UIN Sunan Ampel Surabaya). *Pendidikan Agama Islam*, 03, 1–22.
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi Studi Kasus Di Sekolah Dasar Jambi. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1–12.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Salim, H. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Kencana.
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 3.
- Sudarto, Z. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulthon, S. (2019). Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan. *INKLUSI*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.14421/ijds.060107>
- Zaini Sudarto Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Unesa Abstrak. *Jurnal Pendidikan*, 1, 89–97.